



| KORAN | HAL |
|----------------|-----|
| Haluan | |
| Padang Ekspres | 2 |
| Singgalang | |
| Pos Metro | |

Tanggal

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Bulan

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Datangi KPK, BPK Minta Izin Periksa Syahrul Yasin Limpo

Jakarta, Padek—Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tak ada yang tahu mengapa keduanya datang ke gedung Merah Putih KPK kemarin (17/5). Mereka meminta izin untuk memeriksa Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai saksi. Pemeriksaan itu untuk mendalami dugaan pelanggaran pegawainya yang meminta uang pelicin dalam pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementerian).

Proses yang kemarin merupakan pemeriksaan kedua oleh BPK. Kamis (16/5),

BPK juga meminta izin KPK untuk memeriksa eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Muhammad Hatta dan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kasdi Subagyo.

Disinggung soal pemeriksaan itu, Ali enggan berkomentar. "Tanyakan ke humas BPK," katanya. Begitu pun dengan SYL yang keluar gedung KPK pukul 12.05. Dia enggan menjawab soal pe-

meriksaannya. "Saya nggak bisa kasih keterangan. Tanya pemeriksanya, ya. Makasih ya adikku semuanya," celebutnya.

Temuan itu muncul saat persidangan SYL dkk di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (8/5). Saat itu, Sesdirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Hermanto menyampaikan kepada jaksa KPK. Dia mengaku dimintai duit oleh

auditor BPK Victor Daniel Siahaan dan Haerul Saleh untuk WTP di Kementerian pada 2022.

Victor meminta duit Rp 10 miliar. Namun, permintaan itu bertambah menjadi Rp 12 miliar agar hasil pemeriksaan di Kementerian memperoleh WTP. Dari kesepakatan, akhirnya Kementerian memberikan uang Rp 5 miliar untuk meraih WTP. (elo/c18/bay/jpg)